

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Al-Mushlih dan ash-Shawi, Shalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Ahmad. 2018. *Sarwati, Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publising.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish.hal 3
- Hariyanto, Diah Ratna Sari. 2018. “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia“, Disertasi Universitas Udayana, 2018, hlm.11
- Harun, Fiqih Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Perss,2017), page 66
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, hlm. 295)
- Ilham, Nur R., Sinurat,M. (2021). Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani,
- Moleong, Lexi J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosydakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murfianti, Fitri. (2019). “Hak Cipta dan Karya Seni di Era Digital.”
- Puspita, A. R. (2021). *Analisis hukum islam terhadap praktik investasi Digital Cryptocurrency pada mata uang Digital Bitcoin* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Roisah, Kholis.(2015) . Konsep hukum kekayaan Intelektual:sejarah pengertian dan fiosofis pengakuan HKI dari masa ke masa, setara pers Malang.
- Rosyidi, Suherman. (2012). *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan. 1983. “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Jakarta: PT Aksara Baru.
- Sugiyono, (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sutedjo, M. (2014). Pengelolaan repositori perguruan tinggi dan pengembangan repositori karya seni. In *Seminar Nasional Digital Local Content: Strategi Membangun Repository Karya Seni*.

Sugiharto, A. dkk (2022). NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi, Indonesia Legal Study For Crypto Asset and Blockchain.

Jurnal

Fajrussalam, H., Fadilah, N., Masruroh, M., Marini, F. P., & Khamelia, W. (2022). Pandangan Islam terhadap NFT di Era Digital. *AS-SABIQUN*, 4(1).

Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1),

Ismail, A. R. N., Noviantati, K., Syahril, S., & Fikri, A. R. (2021). Investasi Digital Sebagai Solusi Mengurangi Perilaku Konsumtif Milenial Masa Pandemi Covid-19. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(2).

Nariasih, Ni Putu Epy., M, Ni Luh Made dan W, Ida Ayu putu. (2021). “Pelindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” , Jurnal Analogi Hukum, Vol.3 No.1.

Putri, Karina, and Nahrowi Nahrowi. (2020), "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual." *Journal Of Legal Research* 2.2.

Ramli, Tasya Safiranita dan Rika Ratna Permata,. (2020) “Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1.

Aletha, Nadya Olga. “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt” (2022).

Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1).

Wang, Qing., Li, Rujia Qi Wang, dan Chen, Shiping. (2021). “Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges”, ArXiv, vol 3.

Nurhisam, Luqman. (2017). *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*. International Journal Of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, 2017

- Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). *Gordon, JM (1998). Business Law: An Introduction. Business Law: An Introduction by TheBusinessProfessor. Com, 501.*
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia, 4(1).*
- Sulistianingsih, Dewi. (2016). "Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual." *Yogyakarta: Pohon Cahaya.*
- Wijaya, Dimaz A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Medan: Puspantara
- Ismail, A. R. N., Noviantati, K., Syahril, S., & Fikri, A. R. (2021). Investasi Digital Sebagai Solusi Mengurangi Perilaku Konsumtif Milenial Masa Pandemi Covid-19. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 4(2).*
- Elizabeth, Robling Denning, Dorothy. 1982. *Cryptography and data security.* AddisonWesley Longman Publishing Co., Inc
- Yohandi, Axel. Trihastuti N dan Hartono .D, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura).* Diponogoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017,

Internet dan Power Point

- Copyright 101: Mengenali Hak Cipta Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenali-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/> (diakses tanggal 3 maret 2022 pukul 21.01)
- Davis, james (2021). The Problem with NFTs (And Why They’re Not Really Problems. ([NFT mania is here, and so are the scammers - The Verge](#)) [diakses pada tanggal 26 maret 2022, pukul 15.04 WIB]
- Harsoyo, Agung.(2022). Sekilas Tentang NFT [power point slides 7] retrieved from <http://bit.ly/IPTalksHakCiptaNFT>
- Ramli, Tasya S. (2022) NFT: Perspektif Hak Cipta Digital & Cyber Law [Power Point slide 9] Pusat studi Cyber Law dan Transformasi Digital FAKULTAS HUKUM UNPAD,[power point slides 9] retrieved from <http://bit.ly/IPTalksHakCiptaNFT>
- Mayana, Ranti F. (2022). INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISAI NON FUNGIABLE TOKEN (NFT):

PELUANG, TANTANGAN, DAN PROBLEMATIKA HUKUM
DALAM PRAKTIK [power point slides 22]. Retrieved from
<http://bit.ly//IPTalksHakCiptaNFT>

<https://accurate.id/teknologi/peer-to-peer/> (diakses pada tanggal 19 maret 2022, pukul 07.52 WIB)

<https://hai.grid.id/read/072596641/ilustrator-indonesia-ardneks-diduga-dijiplak-seniman-kripto-twisted-vacancy-pelaku-ngaku-nggak-melihat-kemiripan?page=all> (diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 14.24 WIB)

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/setelah-foto-ktp-giliran-komik-tahilalat-dicuri-dan-dijual-jadi-nft-di-opensea-1xLrczXQesH> (diakses pada tanggal 26 Maret 2022, Pukul 14.36 WIB)

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta; Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
<https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/proses-Pencatatan-Ciptaan-UI-1.pdf> tanggal 5 juni 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220125103038-83-750799/pengertian-sejarah-fungsi-dan-jenis-uang> (diakses tanggal 3 maret 2022 pukul 16.31 WIB)

<https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft> diakses tanggal 6 juli 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia **aransemen**/*aran·se·men/* /*aransemén/ n* **1** *Mus* penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah; **2** usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan yang pengerjaannya bukan sekadar perluasan teknis, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya,
<https://kbbi.web.id/aransemen>

<https://kamus.tokopedia.com/o/opensea/> “cara mendaftar opensea”, Diakses 27 juni 2022

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja dalam perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Penetapan komoditi sebagai subjek kontrak berjangka yang diatur dengan pengaturan kepala Bappebti

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan Umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka